

Resepsi Khalayak Pesan Propaganda Perlawanan Simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat di Akun Instagram @narasinewsroom

*Vika Widiastuti¹, Fitria Ayuningtyas², Munadhil Abdul Muqstith³

e-mail: vikawidiastuti2@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Corresponding Author

Submitted: 02 Desember 2024 Revised: 03 April 2025 Accepted: 21 April 2025

Accredited Sinta-4 by Kemdikbud: No. 0041/E5.3/HM.01.00/2023

Abstrak

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi RUU Pilkada terkait ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah menimbulkan kontroversi di masyarakat. DPR dinilai menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat semua lembaga. Perlawanan atas langkah DPR ini kemudian muncul di media sosial. Diunggah oleh akun Instagram @narasinewsroom, Gerakan ini telah menyedot perhatian khalayak dan memobilisasi aksi luring. Penelitian ini bertujuan mengupas resepsi khalayak atas pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat hingga ke tataran ideologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Sementara pisau analisis yang digunakan adalah teori resepsi Stuart Hall, yaitu untuk melihat posisi khalayak dalam penerimaan pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Tiga posisi tersebut adalah *dominant hegemonic position*, *negotiated code position*, dan *oppositional code*. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada 10 informan berdasarkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, 9 informan berada dalam posisi *dominant hegemonic position* dan 1 informan berada dalam posisi *negotiated code position*. Mayoritas informan memaknai pesan ini sebagai tanda adanya keadaan yang genting dan harus segera direspons oleh rakyat. Namun, partisipasi khalayak terhadap gerakan ini berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor-faktor individual. Sedangkan informan yang berada dalam posisi *negotiated code position* cenderung ambivalen dan skeptis akan efektivitas dari gerakan ini.

Kata kunci: Garuda biru, media dan gerakan sosial, peringatan darurat, pilkada 2024, resepsi khayalak.

Abstract

The House of Representatives (DPR)'s move to revise the Pilkada Bill regarding the provisions on the threshold for regional head nominations and the provisions on the minimum age requirements for regional head candidates has caused controversy in society. The DPR is considered to have annulled the decision of the Constitutional Court (MK) which is binding on all institutions. Resistance to this DPR move then emerged on social media. Uploaded by the Instagram account @narasinewsroom, this movement has attracted public attention and mobilized offline actions. This study aims to examine the audience's reception of the symbolic resistance propaganda message of the Garuda Biru and the Emergency Warning to the ideological level. This study uses a qualitative approach with a critical paradigm. Meanwhile, the analytical tool used is Stuart Hall's reception theory, namely to see the position of the audience in receiving the symbolic resistance propaganda message of the Garuda Biru and the Emergency Warning. The three positions are *dominant-hegemonic position*, *negotiated code position*, and *oppositional code*. Meanwhile, the data collection technique in this study was *purposive sampling* by conducting semi-structured interviews with 10 informants based on criteria in accordance with the research objectives. The results of the study showed that 9 informants were in the *dominant hegemonic position* and 1 informant was in the *negotiated code position*. The majority of informants interpreted this message as a sign of a critical situation and must be responded to immediately by the people. However, public participation in this movement varies, influenced by individual factors. Meanwhile, informants who are in the *negotiated code position* tend to be ambivalent and skeptical about the effectiveness of this movement.

Keywords: Audience reception, emergency warning, garuda biru, media and social movements, regional elections in 2024.

PENDAHULUAN

Dinamika politik di Indonesia jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 memanas pada pekan ke-4 Agustus 2024 lalu. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan UU Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah. Keputusan ini rupanya tidak disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki kecenderungan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung dibandingkan dengan putusan MK. Pada Rabu, 21 Agustus 2024 DPR mengadakan rapat membahas revisi RUU Pilkada terkait Keputusan MK yang kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna pada hari berikutnya, yaitu Kamis, 22 Agustus 2024. Aksi itu pun dinilai akan menganulir putusan MK yang sudah mengikat di semua lembaga negara.

Hal ini kemudian mengakibatkan kekecewaan publik. Bahkan muncul narasi, adanya upaya membenturkan dua lembaga negara yakni MK dan Mahkamah Agung (MA). Kondisi tersebut membuat protes menjadi tidak terbendung, terutama di media sosial. Masyarakat melakukan perlawanan atas langkah kesewenang-wenangan DPR dalam

menyikapi putusan MK. Perlawanan itu dilakukan dengan melakukan *posting* dan/atau *share story* di Instagram, platform X, dan media sosial lainnya. Seperti diketahui, media sosial, sebagai salah satu bentuk dari media baru, bukan hanya digunakan untuk komunikasi antarteman, tetapi juga sebagai platform untuk pertukaran umpan balik (Widyanggari, 2021).

Dalam aksi protes itu, muncul simbol perlawanan berupa gambar Garuda Biru dan berisi tulisan “Peringatan Darurat”. Simbol tersebut disebut *symbolic interaction propaganda* atau propaganda dengan menggunakan lambang-lambang komunikasi yang penuh arti, biasanya meliputi gambar, isyarat, bahasa (baik verbal atau non-verbal) yang telah dirumuskan sedemikian rupa agar merangsang jiwa target propaganda lalu memberikan respons seperti yang diharapkan oleh propogandis atau komunikator (Shoelhi, 2012). Unggahan perlawanan simbolik pada Rabu (21/8/2024) tersebut juga disertai seruan aksi keesokan harinya, Kamis (22/8/2024). Aksi demonstrasi dilakukan massa di Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Konstitusi hingga Istana Presiden. Selain itu, aksi juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Besarnya gejolak perlawanan masyarakat membuat DPR membatalkan pengesahan RUU (Setuningsih, 2024).



Gambar 1. Foto Unggahan Narasineesroom
Sumber: Instagram, 2024

Simbol ini pertama kali diunggah ke YouTube oleh akun EAS Indonesia Concept pada 2023 (CNNIndonesia, 2024). Sistem Peringatan Darurat (EAS) adalah sistem peringatan kedaruratan nasional Amerika Serikat yang dirancang untuk menyebarkan pesan darurat melalui radio dan televisi (CNNIndonesia, 2024). Ini adalah inspirasi dari konsep video ini. Video yang dibuat EAS menampilkan informasi dan kesan horor fiktif atau dikenal sebagai analog horor. Video ini kemudian viral di media sosial Indonesia, setelah akun @narasinewsroom, @matanajwa, @narasi.tv, dan @najwashihab, membagikan ulang di Instagram (CNBCIndonesia, 2024) pada Rabu, 21 Agustus 2024. Video ini turut viral bersama dengan tagar #KawalPutusanMK. Propaganda perlawanan simbolik Garuda biru dengan #PeringatanDarurat dan #KawalPutusanMK menjadi *trending topic* tertinggi di Indonesia pada 21-22 Agustus 2024 dengan diunggah lebih dari 1,58 juta (Yesidora, 2024).

Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara orang berkomunikasi, termasuk cara gerakan sosial menyampaikan pesannya kepada publik. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan terjadinya pergeseran pola penyampaian aspirasi masyarakat, yaitu dari gerakan konvensional beralih ke gerakan digital di mana informasi bisa lebih mudah dan sangat cepat disebarluaskan (Azizah, 2023). Perkembangan media tersebut kemudian memengaruhi strategi atau cara yang dilakukan untuk mempromosikan gerakan-gerakan sosial oleh para aktivis. Media baru lantas menjadi *platform* penting bagi masyarakat dalam berbagi informasi atau berdiskusi mengenai isu-isu sosial serta memfasilitasi perkembangan isu sosial (Xiong et al., 2019). Kemajuan teknologi komunikasi digital memungkinkan gerakan kampanye sosial lokal untuk menjangkau lebih banyak orang dan melampaui batasan geografis (Kwon et al., 2021; Makatlal & Kumar, 2022; Xiong et al.,

2019). Penyebaran informasi melalui sosial media juga relatif sangat cepat, bahkan *real-time* (Makatlal & Kumar, 2022). Hal ini membuat pesan bisa langsung tersampaikan kepada khalayak.

Meski, penyebaran informasi di *new media* lebih cepat dan bersifat dua arah, namun orang-orang masih mengandalkan kredibilitas berita dari media konvensional (Berenson, 2018). Gerakan sosial pada *platform* media baru pun bisa bertahan dan diterima masyarakat luas jika mendapat dukungan dari media arus utama (Azim & Yasmin, 2023). Ini menjadi salah satu alasan mengapa propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat menyedot perhatian banyak orang setelah diunggah oleh akun Instagram @narasinewsroom, @matanajwa, @narasi.tv, dan @najwashihab. Narasi merupakan salah satu media di Indonesia di bawah PT Narasi Media Pracaya yang didirikan oleh wartawan senior Najwa Shihab bersama dengan Catharina Davy dan Dahlia Citra pada 2017 lalu. Selain melalui webpage, Narasi juga kerap mendistribusikan berita melalui media sosial yang dikemas melalui gambar, infografis, hingga video pendek.

Fenomena ini juga menggambarkan bahwa media sosial telah berhasil menjadi alat untuk menggerakkan publik. Media sosial menjadi sarana gerakan sosial oleh kelompok tertentu karena dianggap bisa memobilisasi massa yang lebih besar. Media sosial mampu 'memperluas' suatu isu dan membangun opini publik sekaligus memediasi solusi dari masalah tersebut (Anshori & Nadiyya, 2023). Beberapa waktu terakhir ini, media sosial telah menjadi jembatan bagi banyak gerakan sosial, baik di Hong kong, Turki, Iran, Ukraina, hingga Chili dan Brasil (Clarke & Kocak, 2020).

Di Hong Kong misalnya, Telegram telah menjadi media publik untuk melakukan protes tentang RUU Anti-Ekstradisi pada 2019 (Urman et al., 2021). RUU tersebut memungkinkan Hong Kong mengirim buronan secara yurisdiksi tanpa adanya perjanjian

ekstradisi bilateral, misalnya dengan China Daratan, Taiwan, dan Makau (Urman et al., 2021). Protes kemudian terjadi secara *offline* dan *online*. Para aktivis juga mengkoordinasikan aksi mereka melalui media daring, seperti Telegram dan forum diskusi. Pemerintah kemudian mengumumkan penundaan pengesahan terhadap undang-undang tersebut (Urman et al., 2021).

Selain Hong Kong, media sosial juga telah menjadi media perlawanan di Timur Tengah. Fenomena ini dikenal dengan Arab Spring. Gerakan ini bahkan dijuluki 'Revolusi Facebook' atau 'Revolusi Twitter'. Pada saat itu, Facebook dan Twitter digunakan sebagai penggerak mobilisasi revolusi politik dan dianggap berperan besar atas perlawanan tersebut karena berhasil menggalang dukungan yang besar hingga memfasilitasi demonstrasi serentak di seluruh negeri hingga mendorong revolusioner (Clarke & Kocak, 2020).

Berkaca secara historis, gerakan perlawanan politik di media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Termasuk dengan simbol Garuda Biru sebagai bentuk perlawanan dan peringatan darurat atas situasi politik di Indonesia. Apalagi, keragaman latar belakang Indonesia perlu dijaga agar bangsa ini tidak terpecah. Sementara itu, dari sisi media sosial adanya fenomena Garuda Biru sebagai simbol peringatan darurat menjadi menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengupas resepsi yang diterima khalayak atas adanya simbol Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Gambaran yang ada dalam khalayak, kemudian diejawantahkan dalam penelitian ini hingga tataran ideologi pesan dan khalayak. Sehingga didapati akar pesan yang membentuk resepsi khalayak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana khalayak menerima dan memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik hingga ke tataran ideologi.

Penelitian serupa tentang analisis resepsi terkait gerakan di media sosial sebelumnya telah dilakukan. Penelitian Gultom dan Arviani (2023) misalnya telah membahas

pemaknaan khalayak tentang konten kritik sosial yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melalui akun TikTok tentang DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi Stuart Hall untuk melihat posisi khalayak dalam memaknai pesan tersebut. Tiga posisi itu di antaranya adalah *dominant hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position*. Hasil penelitian ini adalah tiga informan berada dalam *dominant hegemonic position*, dua orang berada dalam *negotiated position*, dan dua orang pada *oppositional position* (Gultom & Arviani, 2023). Informan pada posisi *dominant hegemonic position* menerima pesan tersebut secara penuh. Sedangkan informan yang berada pada posisi negosiasi, setuju dengan kritik yang dilontarkan BEM UI, tetapi tidak setuju dengan ilustrasi yang ditampilkan. Lalu, informan yang berada dalam posisi *oppositional position* menolak kritik tersebut.

Penelitian analisis resepsi berikutnya dilakukan oleh Fitriani et al., (2024) yang meneliti tentang pemberitaan hasil sidang putusan MK Pilpres 2024 pada channel YouTube Tribun Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori analisis resepsi Stuart Hall. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap khalayak yang menonton dan berkomentar di channel YouTube Tribun Timur. Hasil analisis menunjukkan 7 khalayak berada dalam posisi *dominant hegemonic position*, 11 khalayak berada pada posisi *negotiated position* dan 12 khalayak berada dalam *oppositional position* (Fitriani et al., 2024). Mayoritas khalayak berada dalam posisi menolak karena sidang putusan MK pada pilpres 2024 dinilai tidak adil serta terdapat banyak kecurangan pada proses pemilu.

Penelitian lain dari Zakiyah et al., (2023) membahas tentang penerimaan khalayak terkait Pro Kontra RUU Kesehatan di

akun Instagram @drningz. Dr Ningz yang merupakan seorang dokter spesialis sekaligus influencer membagikan informasi mengenai RUU Kesehatan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra khalayak. Peneliti kemudian menggunakan teori resepsi Stuart Hall untuk memahami penerimaan dan pemaknaan RUU Kesehatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 21 pesan *dominant hegemonic*, 1 pesan *negotiated*, dan 2 pesan *oppositional*. Khalayak menginterpretasikan bahwa akun @drningz telah menyajikan RUU kesehatan secara seimbang dan memberikan wawasan baru (Zakiah et al., 2023).

Selanjutnya penelitian analisis resepsi terhadap kampanye di media sosial dilakukan oleh Rajendra & Arviani (2024). Penelitian tersebut mengupas resepsi mahasiswa Surabaya terhadap konten boikot akun Instagram @gerakanbds atas brand Hewlett Packard (HP) yang mempunyai hubungan dengan Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis resepsi Stuart Hall. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi konten. Ada 8 informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas mahasiswa mendukung boikot tersebut dan menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Sementara satu informan bersikap negosiasi dan tetap menggunakan produk HP (Rajendra & Arviani, 2024). Satu informan tersebut juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan pendapat sehingga mencerminkan sikap negosiasi yang terbuka.

Penelitian mengenai analisis resepsi terkait gerakan sosial ataupun kritik terhadap lembaga pemerintah telah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian analisis resepsi khalayak tentang pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat dalam konteks Pilkada 2024 belum pernah dilakukan sehingga penelitian ini baru. Selain berusaha

mengungkap pemaknaan khalayak atas pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat, penelitian ini juga berusaha memahami dinamika media sosial dalam memobilisasi gerakan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi strategi komunikasi yang efektif di media sosial, khususnya dalam konteks penyebaran informasi tentang gerakan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi Stuart Hall dengan pendekatan kualitatif, yaitu memungkinkan adanya upaya eksploratif untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya serta menemukan sesuatu di mana sesuatu tersebut bisa merupakan sesuatu yang sudah dikenal (bisa karena hilang atau terpendam), sebagian belum dikenal atau keseluruhan belum dikenal (Sugiyono & Lestari, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali sedalam-dalamnya bagaimana khalayak memaknai pesan simbolik Garuda Biru dan Peringatan serta posisi khalayak dan ideologi yang melatarbelakanginya. Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma kritis di mana peneliti berusaha membongkar ideologi informan dalam memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Menurut paradigma kritis, ilmu sosial merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengungkap struktur tertentu yang tersembunyi secara kritis (Haryono, 2020). Teori kritis ini merupakan penyelidikan yang terinspirasi dari Marx yang digunakan untuk mengungkap realitas kekuasaan, eksploitasi, dan dominasi (Fuchs, 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti memilih untuk melakukan wawancara dengan pendekatan semi-terstruktur. Teknik wawancara ini sudah mencakup wawancara mendalam, yang memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono & Lestari,

2021). Peneliti memilih teknik wawancara ini karena dipandang lebih bebas dan terbuka untuk menggali data yang sedalam-dalamnya. Meski demikian wawancara tetap terarah dan terfokus pada permasalahan yang ingin diteliti.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan seleksi terhadap informan penelitian berdasarkan tujuan riset (Kriyantono, 2022). Peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu. Pertama, orang dengan rentang usia produktif yaitu antara 15-64 tahun, baik laki-laki maupun Perempuan. Kedua, informan aktif menggunakan media sosial Instagram dan Platform X. Hal ini lantaran pesan propaganda Peringatan Darurat lebih banyak dipublikasikan melalui Instagram dan platform X. Ketiga, informan merupakan pengikut atau follower akun @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv. Dari keempat kriteria tersebut, peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur pada 10 informan.

Dalam pengumpulan data, para informan akan diminta untuk mengungkapkan kembali apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, serta cara mereka memahami isi peringatan darurat dan simbol Garuda Biru. Ada tiga pertanyaan yang diajukan kepada informan, yaitu meliputi pemaknaan, umpan balik, hingga mengungkap ideologi informan dalam memaknai pesan tersebut. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data menggunakan metode analisis Stuart Hall. Menurut Stuart Hall, penelitian tentang khalayak dan media berpusat pada konteks sosial-politik dalam produksi konten oleh media dan bagaimana konten tersebut diinterpretasikan oleh khalayak. Konsep ini dikenal dengan *encoding-decoding*. *Encode* adalah orang yang

memproduksi pesan atau produser, sedangkan *decode* adalah orang yang memaknai pesan atau khalayak. Dalam proses komunikasi, sebuah pesan telah dikodekan sedemikian rupa sehingga penerima bisa memecahkan kode tersebut untuk memaknai pesan (Rayner, 2004).

Resepsi Stuart Hall ini kemudian menempatkan khalayak pada tiga posisi sesuai dengan pemaknaannya terhadap pesan (Nasrullah, 2020). Pertama yaitu *dominant hegemonic position* atau terhegemoni di mana khalayak menerima secara penuh pesan yang disampaikan oleh pengirim. Kedua, yaitu *negotiated code position* atau kondisi di mana khalayak tidak langsung menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim, melainkan ada proses negosiasi di dalamnya. Ketiga, yaitu *oppositional code* atau kondisi di mana tidak menerima pesan atau berada pada posisi oposisi terhadap pesan yang disampaikan (Nasrullah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman seseorang terhadap pesan bisa berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi berbagai hal, seperti nilai-nilai budaya, pengetahuan, pendidikan, pengalaman, kepercayaan, dan lingkungan sosial. (Widyanggari, 2021). Pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru telah menyedot perhatian banyak orang sehingga menarik untuk diteliti hingga ke tataran ideologi. Peneliti memilih beberapa informan yang berasal dari latar belakang yang berbeda sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana informan tersebut memaknai pesan Peringatan Darurat dan Simbol Garuda Biru. Berikut data informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Informan
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

No Informan	Inisial	Jenis kelamin/Usia	Profesi	Latar belakang (pendidikan, suku, domisili)	Frekuensi akses Instagram
1	X	L/23	Mahasiswa	Sarjana Ilmu Komunikasi, Bugis, Luwu Timur	Setiap hari
2	PM	P/31	Jurnalis	Sarjana Sastra Indonesia, Jawa, Kebumen	Setiap hari
3	DS	L/32	Akademisi	Magister Ilmu Komunikasi, Jawa, Purworejo	Setiap hari
4	IH	P/29	Karyawan swasta	Sarjana Teknik Informatika, Jawa-Batak, Jakarta	Setiap hari
5	FS	P/29	Content ceator TikTok Indonesia	Sarjana Kesehatan Masyarakat, Jawa, Bogor	Beberapa hari sekali
6	SHS	L/33	Master of Ceremony	Sarjana Ilmu Komunikasi, Betawi, Jakarta	Setiap hari
7	Dms	L/23	Mahasiswa	Sarjana Ilmu Komunikasi, Jawa, Depok	Setiap hari
8	UCM	L/45	Wiraswasta	Sarjana, Batak, Depok	Kadang-kadang
9	J	L/34	Pegawai Swasta	Sarjana, Jawa, Bekasi	Setiap hari
10	WHY	L/47	Wiraswasta	Sarjana, Jawa, Depok	Setiap hari

A. Pemaknaan Khalayak terhadap Propaganda Simbol Garuda Biru dan Peringatan Darurat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - Desember 2024 dengan melakukan wawancara terhadap 5 informan yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Informan No. 1 mengatakan pesan Peringatan Darurat dan simbol Garuda Biru merupakan bentuk perlawanan dari rakyat ketika mengetahui DPR akan mengubah peraturan dalam proses pilkada 2024. Rakyat kemudian merespons Langkah DPR tersebut melalui gerakan di media sosial. Informan No.1 juga mengungkapkan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kekukuhan demokrasi dimana rakyat berhak berpartisipasi dan menyampaikan kritik agar peraturan tidak diubah-ubah hanya demi kepentingan tertentu. *“Agar tidak terjadi, seperti aturan pada pilkada di mana aturannya sudah ditentukan oleh pemerintah namun ingin dirombak lagi karena ada suatu hal maka dari di situ ada peringatan darurat”* kata Informan No.1.

Sementara itu, informan No 2 memaknai pesan Peringatan Darurat dan simbol Garuda Biru sebagai sebuah hal yang sangat penting pada waktu itu dalam menanggapi sebuah kebijakan pada saat itu yang sangat mendesak. Pesan tersebut, menurut informan No.2 juga telah menarik perhatian generasi muda untuk mencari tahu lebih dalam dan kemudian berpartisipasi terhadap gerakan. Informan No 2 juga memaknai pesan Peringatan Darurat dan Garuda Biru sebagai bentuk protes masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia yang berjalan tidak semestinya. Menurutnya kasus ini bukanlah hal yang baru. *“Ini sebuah rentetan dari peristiwa sebelumnya, dari pencalonan presiden dan wakil presiden sebelumnya, di mana peraturan diubah untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akhirnya rakyat marah dan muncul gerakan di media sosial.”* ungkapnya.

Penggunaan media sosial dalam menyampaikan aksi protes ini, menurut Informan No. 2 juga merupakan hal yang sangat berdampak. Selain menjangkau lebih

banyak orang, penggunaan media sosial dalam gerakan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat juga membangkitkan kesadaran publik terkait keadaan politik yang terjadi di Indonesia. *“Orang-orang di sekitarku, baik yang peduli ataupun kurang peduli dengan isu-isu politik langsung nanya atau mencari tahu lebih dalam,”* terangnya.

Kemudian Informan No.3 memaknai pesan Peringatan Darurat dan Garuda Biru sebagai hal yang cukup menarik sebagai sebuah pesan propaganda yang menunjukkan situasi darurat dan perlu ditanggapi dengan segera oleh rakyat. Bahkan menurutnya, kondisi pada saat itu seperti sudah tidak ada harapan jika Langkah DPR tersebut tidak langsung ditanggapi oleh rakyat melalui peringatan darurat ini. *“Dari sisi lain yang cukup menarik adalah dilakukan secara serentak banyak sekali orang yang memposting itu dan tidak ada instruksi apapun untuk memposting itu dan itu terjadi secara alamiah. Secara respons yang alamiah,”* ucap informan No.3.

Menurut Informan No.3 gerakan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat di media sosial tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan wujud peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sekaligus mengawal proses demokrasi di Indonesia. Dia juga mengatakan, pesan tersebut sekaligus merupakan wujud kontrol sosial terhadap pemerintahan yang direpresentasikan lewat simbol dan tanda-tanda yang perlu segera direspons oleh pemerintah. *“Untuk mengingatkan kita semua barangkali pemerintah memang tidak melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Mungkin terlalu banyak dibutakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga ada suara lain yang bisa didengarkan oleh pemerintah dan suara itu dilakukan lewat tanda-tanda atau media propaganda yang dilambangkan lewat burung garuda dan berlatar belakang warna biru,”* katanya.

Seperti halnya dengan Informan No.3, informan No.4 juga memaknai pesan Peringatan Darurat dan Simbol Garuda Biru sebagai sebuah pesan yang menyatakan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja, terutama menyangkut politik dan demokrasi.

Ada sebuah kegentingan yang langsung direspons oleh rakyat. *“Sebuah perlawanan atas kesewenang-wenangan yang dipertontonkan oleh pemerintah untuk mengotak-atik aturan berpolitik demi kepentingan pribadi atau golongan,”* ujar informan No 4.

Tidak berbeda dengan Informan No.5 yang menyatakan fenomena Garuda Biru dan Peringatan Darurat merupakan hal wajar terjadi di dalam negara yang demokrasi, yaitu bentuk protes dari masyarakat atas langkah yang tidak sesuai dengan koridor yang seharusnya. Menurut Informan No.5 pesan tersebut menandakan adanya hal-hal genting yang sedang terjadi dan perlu diperbaiki segera. *“Pesan tersebut memberikan efek massa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi yang kemudian diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi para petinggi negeri ini bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan butuh diperbaiki sesegera mungkin,”* katanya.

Selanjutnya Informan No.6 memaknai adanya simbol Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai bentuk ketidakberhasilan dalam praktik ideologi Pancasila. Menurutnya pesan tersebut mampu memunculkan perasaan negatif dimana terjadi hal-hal tidak benar yang seharusnya tidak terjadi. Informan No.6 mengaku ia setuju dan tidak setuju dengan pesan tersebut. Hal ini menunjukkan informan No.6 berada dalam posisi negosiasi *“Setuju karena masyarakat Indonesia berani melakukan gerakan sosial untuk kebaikan harkat masyarakat Indonesia. Namun saya juga tidak setuju, jika hal ini hanyalah bentuk protes yang hanya dimulut saja dan mungkin bentuk pengalihan isu saja dari oknum pemerintah,”* katanya.

Informan No.7 memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda biru dan Peringatan darurat sebagai pesan yang sangat penting terkait dengan keselamatan dan kewaspadaan. Pesan ini, menurutnya juga berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan keadaan darurat. Ia pun mengaku setuju dengan pesan ini agar masyarakat segera mengambil sikap atas hal-hal yang sudah di luar koridor. Sementara Informan No.8 memaknai simbol Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai informasi yang penting yang berhubungan dengan peringatan akan keselamatan dan

kondisi berbahaya. “Hal tersebut menjadi sesuatu yang serius dan mendesak,” katanya.

Selanjutnya, Informan No. 9 memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat sebagai aksi solidaritas masyarakat melawan bentuk orde baru versi saat ini, yaitu dimana Keputusan lembaga pemerintah bisa *di-lobby* untuk menguntungkan pihak tertentu. Kemudian informan No.10 memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai tanda adanya kekhawatiran dan kecemasan yang sangat akut dari sebagian masyarakat, khususnya yang mendukung simbol garuda biru di mana mereka merasa kecewa terhadap pemerintah. “Di benak saya saat itu, ada sesuatu masalah serius di negara ini,” kata informan No.10.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mayoritas informan setuju dengan pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Ada 9 informan yang berada pada posisi *dominan-hegemonic* atau terhegemoni. Hal ini berarti 9 informan tersebut menerima penuh pesan propaganda perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat. Sementara 1 informan berada dalam posisi *negotiated code position* atau posisi negosiasi di mana ia mengaku setuju sekaligus tidak setuju. Informan No.6 menunjukkan ambivalensi terhadap pesan tersebut. Di satu sisi, dia setuju terhadap gerakan tersebut, tetapi di sisi lain dia merasa ragu dan skeptis dengan efektivitasnya serta mempertimbangkan potensi adanya pengalihan isu.

Mayoritas informan memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai adanya situasi yang gawat atau genting sehingga perlu direspons sesegera mungkin. Informan No.1 memaknai pesan ini sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Langkah DPR yang mengubah peraturan pada saat proses Pilkada 2024. Sementara Informan No.2 memaknai pesan tersebut sebagai aksi protes atas proses demokrasi yang tidak sesuai koridor. Informan No.2 juga menekankan efek dari pesan tersebut terhadap kesadaran politik generasi muda. Pesan tersebut telah mendorong mereka untuk mencari tahu,

bahkan kemudian berpartisipasi di dalam gerakan.

Informan No.3 memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai situasi darurat sehingga membangkitkan respons alamiah masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan. Informan No.3 juga menekankan gerakan ini sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, informan No.4 dan No.5 melihat pesan ini sebagai cerminan keadaan yang gawat di mana peraturan diubah demi kepentingan pihak tertentu. Sehingga aksi protes dalam gerakan ini wajar dalam konteks demokrasi. Informan No.5 juga mengatakan gerakan ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah bahwa ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki.

Informan No.6 yang mengungkapkan ambivalensi atas pesan tersebut. Di satu sisi ia setuju dengan gerakan tersebut karena adanya perasaan negatif terhadap kondisi politik saat ini. Namun, ia juga tidak menunjukkan optimisme terhadap gerakan ini. Kemudian, informan No.7 dan No.8 menekannya pentingnya pesan ini dan terhadap kewaspadaan masyarakat atas kondisi genting yang mungkin terjadi akibat kebijakan pemerintah. Informan No.9 dan No.10 melihat pesan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan pihak tertentu sehingga memunculkan kondisi gawat yang perlu segera direspons. Informan No.9 juga mengatakan bahwa gerakan ini juga merupakan bentuk solidaritas masyarakat dalam melawan praktik-praktik yang tidak adil.

B. Umpan Balik Khalayak Setelah Memaknai Pesan Propaganda Perlawanan Simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat

Umpan balik atau *feedback* dalam gerakan di media sosial salah satu hal yang penting karena bisa menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah gerakan, yaitu untuk melihat bagaimana efektivitas komunikasi yang telah dilakukan dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Mengingat sifat dari media sosial yang dinamis sehingga memungkinkan adanya interaksi dan umpan balik dari khalayak. Umpan balik tersebut tersebut bisa digunakan

untuk merumuskan strategi dan taktik dengan cepat berdasarkan dengan keterlibatan dan sentimen dari publik (Leong et al., 2019). Selain itu, interaksi *real-time* di media sosial juga bisa meningkatkan visibilitas isu dan memobilisasi dukungan serta partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas *offline* (Kidd & McIntosh, 2016). Jadi, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali respons atau umpan balik dari khalayak setelah memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat serta sejauh mana keterlibatan informan dalam aksi luring.

Setelah melihat dan memaknai pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat, informan No.1 langsung mengomentari postingan tersebut. Ia mengaku menggunakan emoji api dalam komentarnya sebagai bentuk perlawanan terhadap Langkah DPR. Dalam komunikasi digital informal, emoji api bisa mencerminkan antusiasme, kegembiraan, penyampaian emosi, gairah, atau sesuatu yang “menyala” (Elwert et al., 2023; Ruan, 2011). Hal ini menunjukkan antusiasme dan dukungan dari Informan No.1 terhadap pesan Peringatan Darurat dan Garuda Biru. “Menurut aku, adanya distorsi antara rakyat dan pejabat di DPR itu bisa merusak demokrasi. Jadi harus dilawan,” katanya.

Selain itu, Informan No.1 mengatakan dia lebih memilih melakukan aksi perlawanan di media sosial dibanding aksi secara luring. Menurutnya, aksi di media sosial juga sangat diperlukan di zaman teknologi saat ini. Berbeda dengan aksi luring, aksi di media sosial lebih minim risiko asal sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, jika aksi turun ke jalan, menurutnya orang lebih rentan terhadap kekerasan. “Setiap orang punya pandangan tersendiri, kalau aku tetap perlawanan di media sosial karena mempertimbangkan resiko jika aksi turun ke jalan,” katanya.

Sementara itu, Informan No.2 mengaku dirinya juga ikut menyebarkan pesan tersebut dengan mengunggah ulang di *stories* akun Instagram-nya. Menurutnya, langkah tersebut dilakukannya sebagai sikapnya atas fenomena yang terjadi serta dukungannya terhadap pesan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Meski turut memberikan umpan balik di media sosial,

Informan No.2 mengaku dirinya memilih tidak ikut aksi luring. “Saya nggak ikut aksi karena memang tidak memungkinkan. Jadi dukung saja lewat media sosial. Saya juga mendukung adanya aksi selama tidak bersifat anarkis,” terang Informan No.2.

Kemudian, Informan No.3 yang juga mengaku dirinya tergerak untuk ikut aksi menyuarakan keresahan yang terjadi pada waktu itu dan memberikan dukungan terhadap pesan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. “Saya ikut mengunggah ulang pesan tersebut karena pada saat itu kita sedang dalam kondisi yang sama, perasaan yang sama, yaitu ada agenda yang cukup penting dalam menentukan eksistensi kita sebagai rakyat serta bagaimana nasib konstitusi kita, apakah benar diabaikan atau tidak,” ungkapnya.

Perasaan tersebutlah yang kemudian secara naluri membuat Informan No 3 turut menyebarkan konten di media sosial. Menurutnya apa yang dilakukannya merupakan wujud kontribusi dalam mengawal konstitusi karena adanya dugaan terhadap pelanggaran hasil konstitusi. Adanya perlawanan dari lembaga legislatif yang juga merupakan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia di mana perlawanan tersebut bersifat kontraproduktif dan justru cenderung bersifat mengkerdulkan MK. Jadi, agenda utama dalam gerakan tersebut menurut Informan No.3 adalah menyelamatkan dan mengawal konstitusi, “Jika rakyat tidak bergerak akan berbahaya untuk demokrasi,” pungkask informan No.3.

Sama seperti informan sebelumnya, Informan No.4 mengaku juga turut menyebarkan pesan tersebut di akun media sosialnya sebagai tanda setuju dan dukungan terhadap pesan perlawanan tersebut, Meski tertarik ikut aksi, Informan No.4 mengaku kondisinya saat itu tidak memungkinkan dia untuk mengikuti aksi secara luring sehingga dia turut melakukan perlawanan di media sosial. “Saya berminat sebenarnya, tetapi tidak turut berpartisipasi karena alasan pekerjaan,” kata Informan No.4.

Informan No.5 mengaku meski dirinya setuju dengan pesan perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat, ia tidak turut menyebarkan pesan tersebut. Ia juga

mengatakan tidak memiliki keinginan untuk ikut aksi. *“Karena saya tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut.”* Katanya. Sama dengan Informan No.5, Informan No 6 mengatakan dirinya tidak tertarik untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Karena dia mempertimbangkan kerugian yang mungkin akan dialaminya saat ikut aksi. *“Jika saya ikut serta akan menghabiskan energi, batre HP, tenaga, pikiran, dan kuota saya.”* Katanya.

Kemudian informan No.7 mengaku ia merasa tergerak untuk ikut dalam aksi luring ketika melihat pesan tersebut di media sosial. *“Menurut Saya, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang merasa perlu untuk memperjuangkan perubahan, terutama berkaitan dengan revisi UU Pilkada yang dianggap kontroversial,”* jelas informan No.7.

Sama dengan informan No.5 dan Informan No.6, Informan No.8 mengaku tidak tertarik untuk ikut dalam aksi. Hal ini karena alasan pekerjaan. Sementara Informan No.9 mengaku sangat setuju dengan gerakan tersebut dan ikut tergerak berkontribusi dalam aksi di media sosial dengan turut menyebarkan pesan tersebut. Kemudian informan No.10 mengaku sangat setuju dengan pesan propaganda perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat secara substansi isinya. Namun, dirinya hanya menjadi pengamat. *“Saya tidak ikut dalam tindakan langsung, tetapi saya sangat setuju,”* kata Informan No.10.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa media sosial telah berhasil menjadi platform untuk menggalang dukungan dalam gerakan sosial. Hal ini lantaran mayoritas informan mengaku tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk dukungan di media sosial dan aksi luring. Informan No.1, No.2, No.3, No.4, No.7, dan No.9 mengaku lebih berpartisipasi melalui media sosial dengan cara menyebarkan pesan tersebut. Informan No.1 mengaku memilih aksi melalui media sosial karena mempertimbangkan risikonya di mana aksi di media sosial lebih minim risiko dibanding aksi secara luring. Sementara informan No.2 dan No.4 mengaku tidak ikut aksi secara luring karena tidak memungkinkan akibat faktor-faktor individual, seperti waktu dan pekerjaan.

Kemudian Informan No.5 dan No.6 mengaku tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi, baik secara online ataupun offline. Hal ini didasari karena keterbatasan waktu serta risiko yang mungkin terjadi. Jadi, meskipun mendukung pesan ini, informan No.5 tidak tergerak berpartisipasi di dalam aksi. Hal ini pula yang terjadi pada informan No.8 dan No.10. Keduanya sama-sama mendukung pesan propaganda perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat, tetapi memilih tidak terlibat dalam aksi.

Meski demikian, dari total informan, mayoritas tergerak berpartisipasi dalam gerakan. Hal ini menunjukkan meskipun kesadaran politik yang meningkat di kalangan masyarakat, tetapi cara orang terlibat dalam gerakan berbeda-beda. Namun, mayoritas informan dalam penelitian ini setuju tentang pentingnya menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

C. Ideologi Khalayak

Ideologi merupakan hal yang penting dalam gerakan sosial. Ideologi merupakan sistem yang terdiri atas berbagai kepercayaan, ide, nilai, prinsip, etika, moral, tujuan, dan sebagainya, yang semuanya saling tumpang tindih untuk memperkuat satu sama lain (Aga, 2022). Orientasi ideologi individu, misalnya, bisa memengaruhi persepsi dan opini mereka secara signifikan (Nogueroles et al., 2024). Ideologi bisa menjadi pemersatu masyarakat, yaitu melalui kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka yakini, tetapi ideologi bisa juga menciptakan konflik bahkan perpecahan ketika ideologi orang-orang berseberangan (Montgomery et al., 2024). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menggali lebih jauh ideologi informan dalam proses pemaknaan pesan perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat.

Informan No.1 menegaskan pentingnya ideologi kritis dalam kasus ini, yaitu kritik terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Ia mendukung pesan perlawanan simbolik tersebut adalah karena adanya distorsi aturan pemerintah yang dianggap tidak semestinya dan menyimpang dari prinsip demokrasi sehingga perlu

diluluskan oleh rakyat. *“Distorsi ini adalah tentang aturan yang sebenarnya masyarakat sudah tahu, tetapi justru dirombak dari yang seharusnya. Pemerintah pun justru cenderung menyingkirkan janji-janji yang seharusnya mereka tepati,”* terang Informan No.1.

Sementara itu, informan No. 2 mengaku menerima penuh pesan ini karena rasa nasionalisme atau rasa cinta pada negara tempat di mana dia dilahirkan dan tumbuh. Jadi, sebagai rakyat Indonesia, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal proses demokrasi serta ikut bersuara ketika ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan koridornya. *“Intinya lebih peduli ke negara, tidak apatis. Jadi saya ikut menyebarkan pesan tersebut di media sosial,”* katanya.

Informan No.3 menerima secara penuh pesan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat pada saat itu karena menurutnya pesan tersebut mewakili respons rakyat terhadap kondisi yang terjadi dalam kontestasi politik pada saat itu. Hal ini lantas membuatnya tergerak untuk melakukan posting ulang di akun media sosialnya sebagai wujud dukungan terhadap gerakan tersebut. Dia mengatakan, keputusannya tersebut dilatarbelakangi oleh rasa cinta terhadap tanah air dan komitmen agar Indonesia melakukan kontestasi yang sehat sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, tanpa mengubah-ubah peraturan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. *“Gerakan perlawanan di media sosial tersebut sekaligus menjadi penyeimbang negara bahwa suara rakyat itu didengar,”* tuturnya.

Kemudian Informan No.4 mengatakan ideologi yang melatarbelakanginya mendukung pesan ini adalah demokrasi. Menurut rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Selain memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu, rakyat berhak mengawal keputusan politik yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Hal ini guna memastikan pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi sehingga rakyat memiliki hak untuk bersuara dalam proses keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Hal inilah yang mendasarinya setuju dengan pesan perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat karena

sesuai dengan prinsip dan ideologi yang dipegangnya.

Informan No 5 mengungkapkan, dukungannya terhadap pesan perlawanan simbolik garuda biru dan peringatan darurat ini karena sadar akan adanya sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki segera. Informan No.5 merasa apa yang dilakukan pemerintah tidak semestinya sehingga perlu adanya kritik dari rakyat agar lembaga negara tersebut kembali ke jalur yang semestinya, yaitu menjalankan kontestasi politik dengan adil tanpa adanya niat atau kepentingan politis yang lain. *“Ada sesuatu hal yang terjadi dalam proses pilkada ini tidak sesuai dengan semestinya dan harus diubah,”* tuturnya.

Informan No.6 mengatakan, pesan propaganda simbolik garuda biru dan peringatan darurat tidak menumbuhkan rasa patriotismenya. Sebaliknya justru muncul perasaan negatif terhadap negara ini. *“Pesan peringatan darurat ini, berhasil menghadirkan segala persepsi negatif dan menumbuhkan juga rasa tidak peduli terhadap Indonesia,”* katanya.

Kemudian Informan No.7 berpartisipasi dalam gerakan sosial ini karena rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air serta adanya rasa kebersamaan sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi dalam memperjuangkan keadilan. Sementara Informan No.8 mengaku setuju dengan pesan tersebut didasari karena kebersamaan dan rasa tanggung jawab antara sesama warga negara. Kemudian informan No.9 mengaku sikapnya didasari oleh rasa nasionalisme. Dia mengatakan seharusnya lembaga pemerintahan merepresentasikan hukum yang berimbang dan tidak memihak, bukannya mengubah peraturan demi kepentingan pihak tertentu. Informan No.10 mengatakan sangat setuju dengan pesan ini karena ideologi demokrasi yang saat ini sudah berlaku secara universal dan dipraktikan di banyak negara. Berdasarkan ideologi ini, rakyat berhak ikut menyuarakan kegelisahannya terhadap pemerintah. Sekaligus menjadi alat kontrol terhadap pemerintah.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ideologi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan respons masyarakat terhadap gerakan sosial.

Informan No.1 dan No.5 menekankan pentingnya ideologi kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan koridor yang seharusnya sehingga perlu adanya kritik dari masyarakat untuk mengembalikan proses politik ke jalur yang benar. Ideologi ini telah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam gerakan sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.

Informan No.2, No.3, No.7 dan No.8, dan No.9 menunjukkan bahwa rasa nasionalisme terhadap negara dan rasa tanggung jawab sosial telah mendorong mereka mendukung pesan perlawanan ini. Mereka memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi di dalam gerakan. Selain itu, rasa cinta tanah air telah memotivasi mereka turut serta dalam gerakan. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme bisa menjadi alat mobilisasi yang kuat dalam mendorong masyarakat berkontribusi dalam sebuah gerakan yang dianggap penting untuk masa depan negara.

Sementara itu, informan No.4 dan No.10 menekankan pentingnya ideologi demokrasi dalam proses politik. Di mana rakyat memiliki kekuasaan dan hak dalam mengawasi keputusan politik dari pemerintah sekaligus menjadi kontrol sosial ketika sebuah kebijakan sudah dianggap menyeleweng. Hal ini menunjukkan bahwa paham demokrasi telah membuat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan sosial.

Namun di sisi lain, informan No.6 menunjukkan bahwa tidak semua individu merespons gerakan tersebut dengan semangat yang positif. Menurutnya, pesan tersebut justru menambah perasaan negatifnya terhadap negara, bukannya menumbuhkan rasa patriotisme justru sebaliknya muncul ketidakpedulian. Hal ini menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang merasa frustrasi dengan kondisi politik dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Ia juga menganggap gerakan sosial semacam ini mungkin tidak membawa perubahan yang diharapkan, bahkan ada kemungkinan sebagai pengalihan isu. Sikap skeptisme ini bisa menjadi tantangan bagi gerakan sosial karena bisa mengurangi partisipasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan pemaknaan khalayak terhadap pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat dalam konteks gerakan sosial di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan, mayoritas informan setuju dengan pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan peringatan darurat. Ada 9 informan yang berada pada posisi *dominan-hegemonic* atau terhegemoni. Sembilan informan tersebut menerima penuh pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Sementara 1 informan berada dalam posisi *negotiated code position*.

Mayoritas informan dalam penelitian ini memaknai pesan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap DPR yang dianggap menyalahi peraturan dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Mereka memaknai simbol Garuda Biru dan Peringatan Darurat sebagai tanda adanya kondisi yang gawat atau genting pada saat itu sehingga perlu direspons oleh rakyat sesegera mungkin. Hal ini menunjukkan, simbol tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menjadi kontrol sosial. Terutama untuk mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah-ubah peraturan demi keuntungan pihak tertentu. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, 9 informan menunjukkan dukungan terhadap pesan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan perasaan, pandangan, dan tujuan untuk menjaga konsistensi dalam proses politik, terutama dari kepentingan-kepentingan tertentu.

Fenomena ini menunjukkan, peran penting media sosial sebagai media dalam menyebarkan pesan gerakan sosial. Media sosial telah menjadi platform yang efektif dalam menyebarkan isu gerakan sosial serta menggalang dukungan dalam waktu singkat. Selain itu, informan juga menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya mendorong partisipasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran politik karena masifnya perlawanan di media sosial pada waktu itu. Meski demikian, tidak semua informan tertarik terlibat dalam aksi

luring. Mayoritas informan lebih memilih berpartisipasi melalui media sosial, yaitu Informan No.1, No.2, No.3, No.4, No.7, dan No.9. Sementara informan No.2 dan No.4 sebenarnya tertarik ikut aksi luring, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Sedangkan informan No.5, No.8, dan No.10 yang meski setuju dengan gerakan ini, tetapi tidak tertarik untuk ikut dalam aksi, baik online maupun offline.

Kemudian, peneliti juga menyoroti pentingnya menggali ideologi yang membentuk pemahaman khalayak atas pesan ini. Dari hasil wawancara diketahui bahwa ideologi seperti nasionalisme, demokrasi, dan kritis sangat berperan terhadap membentuk respons individu atas sebuah gerakan. Informan yang berangkat dari ideologi nasionalisme, demokrasi, dan kritis, serta tanggungjawab sosial cenderung mendukung gerakan ini. Sementara informan yang bersifat skeptis terhadap efektivitas dari gerakan ini cenderung menunjukkan sikap ambivalensi. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa tidak semua individu merespons gerakan ini secara positif. Sikap Informan No.6 misalnya cenderung ambivalen dan tidak pasti. Ia bersifat skeptis terhadap efektivitas dari gerakan ini. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi gerakan sosial.

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi dan konteks politik sangat berpengaruh terhadap respons individu atas sebuah gerakan sosial. Meskipun gerakan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat mampu meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran politik pada masyarakat, tetapi kontribusi masyarakat dalam gerakan berbeda-beda. Ada yang tertarik ikut serta dalam aksi luring, ada juga yang lebih memilih berpartisipasi di media sosial. Namun, ada juga yang meski mendukung gerakan memilih untuk tidak berpartisipasi. Lalu, ada pula yang bersifat negosiasi terhadap gerakan ini dan tidak tertarik untuk berpartisipasi. Meski demikian, individu yang berpartisipasi melalui online paling mendominasi. Hal ini mencerminkan adanya dinamika terkait keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga, F. G. (2022). Ideology. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (pp. 1–5). <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbbsp.m106.pub2>
- Anshori, I., & Nadiyya, F. A. A. (2023). Peran Ruang Digital sebagai Transformasi Gerakan Aksi Sosial Mahasiswa Melalui Platform Sosial Media. *Jurnal Analisa Sosiologi*. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.68981>
- Azim, S., & Yasmin, F. S. (2023). The Role of Mainstream and New Media in Developing Social Movements: A Case of Shahbagh Movement. *Social Science Review*. <https://doi.org/10.3329/ssr.v39i1.64874>
- Azizah, N. (2023). Social Movement as a Form of Online Political Participation in Social Media. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9. <https://doi.org/10.29210/0202312255>
- Berenson, A. (2018). Journalism and Social Media Frame Social Movements: The Transition to Media Matrix. *Social Media and Journalism - Trends, Connections, Implications*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.78290>
- Clarke, K., & Kocak, K. (2020). Launching Revolution: Social Media and the Egyptian Uprising's First Movers. *British Journal of Political Science*, 50. <https://doi.org/10.1017/S0007123418000194>
- CNBCIndonesia. (2024). *Viral Peringatan Darurat Garuda Biru Banjiri Medsos, Ini Maknanya*. CNBCIndonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240821153138-37-565213/viral-peringatan-darurat-garuda-biru-banjiri-medsos-ini-maknanya>
- CNNIndonesia. (2024). *Viral Peringatan Darurat Indonesia di Media Sosial, Apa Artinya?* CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240821185117-20-1135886/viral-peringatan-darurat-indonesia-di-media-sosial-apa-artinya>
- Elwert, F., Evolvi, G., Neumaier, A., & Wildt, K. de. (2023). : Emoji and Religion in the Twitter Discourses on the Notre Dame Cathedral Fire. *The Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 11(2), 198–226. <https://doi.org/10.1163/21659214-bja10071>
- Fitriani, N., Hayat, N., & Hilmiyah, M. (2024). Resepsi Khalayak terhadap Pemberitaan Hasil Sidang Putusan Mk Pilpres 2024 pada ChannelYoutube Tribun Timur. *PUBLISTIK: RISET JURNALISTIK DAN MEDIA KOMUNIKASI*, 1. <https://doi.org/10.35905/publistikji.v1i2.11814>
- Fuchs, C. (2016). *Critical Theory of Communication*. University of Westminster Press.
- Gultom, D. A., & Arviani, H. (2023). Resepsi Khalayak

- Terhadap Konsep Kritik Sosial “Dewan Perampok Rakyat” BEM UI di TikTok. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v%25vi%25i.%25Y.%25p>
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Kidd, D., & McIntosh, K. (2016). Social Media and Social Movements. *Sociology Compass*. <https://doi.org/10.1111/soc4.12399>
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertasi Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana.
- Kwon, K. H., Shao, C., & Nah, S. (2021). Localized Social Media and Civic Life: Motivations, Trust, and Civic Participation in Local Community Contexts. *Journal of Information Technology & Politics*, 18. <https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1805086>
- Leong, C., Pan, S. L., Bahri, S., & Fuazi, A. (2019). Social media empowerment in social movements: power activation and power accrual in digital activism. *European Journal of Information Systems*, 28(2). <https://doi.org/10.1080/0960085X.2018.1512944>
- Makatlal, V., & Kumar, D. (2022). The Impact of Social Media on Political Mobilization and Activism. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 3.
- Montgomery, D. P., Green-Eneix, C., Cinaglia, C., & Costa, P. I. De. (2024). Ideology. In *The Encyclopedia of Applied Linguistics* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal20299>
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nogueroles, P., Salgueiro, T. A., Vera, S. E., Valderrama, C. L. M., & Larrosa, P. N. F. (2024). Role of political ideology in information monitoring and opinion change. *SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations*. <https://doi.org/10.56294/piii2024273>
- Rajendra, H. R., & Arviani, H. (2024). Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya Terhadap Konten Boikot Brand Hewlett Packard (HP) yang Memiliki Hubungan dengan Israel pada Akun Instagram @gerkanbds. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9.
- Rayner, P. P. W. and S. K. (2004). *Media Studies: The Essential Resource*. Routledge.
- Ruan, L. (2011). Meaningful Signs—Emoticons. *Theory and Practice in Language Studies*, 1(1), 91–94. <https://doi.org/10.4304/tpls.1.1.91-94>
- Setuningsih, N. (2024). *Perlawanan Sehari Kawal Putusan MK, RUU Pilkada Batal Disahkan*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/19221311/perlawanan-sehari-kawal-putusan-mk-ruu-pilkada-batal-disahkan?lgn_method=google&google_btn=on etap
- Shoelhi, M. (2012). *Propaganda dalam Komunikasi Internasional* (Pertama). Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional)*. Alfabeta.
- Urman, A., HO, J. C., & Katz, S. (2021). Analyzing Protest Mobilization on Telegram: The Case of 2019 Anti-Extradition Bill Movement in Hong Kong. *Plos One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256675>
- Widiyanggari, E. N. (2021). Analisis Resepsi Penggunaan Media Sosial untuk Pengambilan Keputusan pada Kampanye New Normal (Video YouTube “Tips Cegah Corona Ala Dokter Reisa”). *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 02. <https://doi.org/10.54895/jkb.v2i2.896>
- Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the #MeToo movement. *Public Relations Review*. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.014>
- Yesidora, A. (2024). *Apa Arti Peringatan Darurat yang Viral di Medsos, Dari Mana Asal Usulnya?* Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/berita/nasional/66c6953cbb78c/apa-arti-peringatan-darurat-yang-viral-di-medsos-dari-mana-asal-usulnya>
- Zakiah, Y., Cahyani, S. R., Noviana, L., & Amalia, D. (2023). Penerimaan Netizen Terhadap Pro Kontra RUU Kesehatan Pada Akun Instagram @Drmingz. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3.